

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Sebagai generasi penerus yang memiliki intelektual, mahasiswa tentunya memiliki peran dan tanggung jawab ideologis sebagai pewaris utama perjuangan bangsa maupun tanggung jawab professional untuk dipersiapkan sebagai ahli pada bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif di dalam proses pembangunan.

Dalam catatan sejarah bangsa terbukti bahwa mahasiswa berperan besar atas bergulirnya reformasi 1998. Termasuk pula organisasi mahasiswa yang memberikan sarana kepada para mahasiswa dalam memberikan sumbangsuhnya terhadap kemampuan serta pergerakan mahasiswa. Sebagai generasi penerus dan agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk bisa memanfaatkan organisasi mahasiswa sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk bisa mewadahi kemampuan mahasiswa dan mengembangkannya. Caranya yaitu dengan aktif terlibat dan berpartisipasi di dalam organisasi mahasiswa melalui beragam kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya guna membentuk diri sebagai organisatoris yang handal dan dapat memberikan perubahan terhadap diri sendiri, lingkungan serta bangsa.

Dalam perannya, mahasiswa memegang peran sebagai *agent of change* tentunya mahasiswa diharapkan memiliki kekuatan baik secara intelektual maupun moral. Namun semua itu tidak akan dapat terwujud tanpa ada sesuatu

yang bisa mewadahnya sekaligus menjalankan proses untuk memberdayakan mahasiswa. Maka untuk mewadahi itu semua, organisasi mahasiswa memegang peran penting sebagai salah satu sarana pendidikan politik bagi perkembangan mahasiswa.

Namun di UIN Sunan Gunung Djati, khususnya mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 yang menjadi objek penelitian ini, fakta yang di dapat dari data menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 sebagian aktif dalam organisasi mahasiswa, namun sebagian tetap ada yang memilih untuk tidak berpartisipasi dan terlibat dalam organisasi politik kampus, dan seolah bersikap apatis terhadap dunia organisasi dan politik¹. Padahal apabila kita melihat Jurusan Sosiologi yang bernaung di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tentunya telah memberikan kontribusi akan pengetahuan dan nilai-nilai politik yang disajikan di kelas perkuliahan melalui berbagai mata kuliah yang di berikan di dalamnya, yang seharusnya dapat menjadi dasar ilmu serta dorongan untuk mengimplementasikan ilmu politik yang dimiliki ke dalam organisasi politik kampus. Apabila di uraikan, matakuliah yang di berikan di dalam jurusan sosiologi mulai dari semester 1 Hingga semester 6 saat ini, mulai dari Pengantar Ilmu Politik, Sosiologi Politik, Pemikiran Politik Islam, Sosiologi Korupsi, Sosiologi Organisasi, dan Agama dan Politik.

Wujud dari pada pendidikan politik tentunya tidak hanya terbatas pada materi perkuliahan saja, namun perlu di implemantasikan ke dalam organisasi mahasiswa, karena keduanya merupakan bentuk dari pendidikan politik, materi,

¹ Data Kepengurusan HMJ Sosiologi Periode 2017, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

wawasan, serta nilai-nilai politik merupakan dasar pengetahuan guna memperkenalkan nilai dari pada politik itu sendiri perlu dituangkan dan di implementasikan pada organisasi. Sedangkan organisasi mahasiswa adalah sarana dimana mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu perkuliahannya, melengkapi wawasannya, serta mengembangkannya. Aktivitas organisasi yang dilakukan mahasiswa tentunya memberikan suatu ruang pergerakan untuk bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, yang nantinya akan memberikan manfaat secara efektif baik bagi dirinya pribadi maupun bagi masyarakat.

Pendidikan politik berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, wawasan dan nilai-nilai politik tentang sistem politik yang ideal. Yang dimana mahasiswa akan memiliki standar penilaian terhadap sebuah sistem politik dan memiliki sikap yang kritis. Untuk itu di dalam pendidikan politik senantiasa terkandung nilai-nilai politik yang ideal, dengan demikian hal tersebut akan membentuk suatu tingkah laku politik. Dan jika pendidikan politik dilakukan dengan baik dan sistematis maka akan menumbuhkan kekuatan-kekuatan yang positif dan demokratis. Artinya pendidikan politik menekankan pada usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang etis, yaitu nilai-nilai landasan motivasi bangsa untuk membina dan mengembangkan diri agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bangsa dan Negara.

Merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan Althoff² menganggap bahwa sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Maka pada tingkat mahasiswa, sekaligus sebagai bagian dari penerus bangsa, pengembangan diri tersebut dapat diwujudkan dengan aktif dan berpartisipasi dalam lingkungannya yaitu kampus, dengan mengikuti organisasi mahasiswa. Organisasi politik mahasiswa yang merupakan sarana untuk pengembangan pendidikan politik yang di dapatkan di perkuliahan, juga memberikan nilai-nilai dan wawasan pendidikan politik lebih lanjut, sebagai pelengkap dari pada pendidikan politik yang di dapatkan di perkuliahan.

Di dalam lingkungan kampus, organisasi mahasiswa tentunya ada beragam jumlahnya yang keseluruhannya sama-sama membina, mewadahi, serta mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menciptakan generasi yang berguna bagi individunya masing-masing, organisasi, kampus, serta bangsa dan negara. Organisasi mahasiswa terbagi menjadi dua, yaitu organisasi mahasiswa Internal (*Intra*) dan organisasi mahasiswa Eksternal (*Ekstra*), organisasi mahasiswa intra adalah organisasi yang melekat pada pribadi universitas dan memiliki kedudukan yang resmi di lingkungan kampus. Serta mendapat pendanaan kegiatan secara mandiri dari pengelola universitas. Bentuknya berupa Himpunan Mahasiswa

²Rush, Michael dan Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2002. Hlm 22.

Jurusan (HMJ), Senat Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sedangkan organisasi mahasiswa ekstra adalah organisasi yang dibentuk dengan berbasiskan kesadaran dan kesukarelaan, dan yang membedakannya yaitu dari segi pendanaan dan pengesahan dari pihak universitas, contohnya yaitu PMII, HMI dan KAMMI. Keseluruhannya, baik organisasi intra ataupun ekstra sama-sama bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa dan memberikan pendidikan politik..

Namun dari kesamaan tujuan organisasi tersebut, tentu ada hal yang membedakannya, khususnya dalam ranah organisasi-organisasi ekstra, yaitu bentuk dari ideologi-ideologinya. Maka dengan adanya perbedaan ideologi, hal ini terkadang memunculkan perbedaan pendapat dan pandangan politik ketika para kader organisasi-organisasi ekstra bergabung dalam satu organisasi intra. Bahkan di lain kondisi perbedaan tersebut menimbulkan perselisihan politik, tak heran apabila masing-masing organisasi ekstra berada dalam perebutan jabatan atas kepengurusan organisasi intra, hingga menimbulkan persaingan politik yang sengit.

Hal tersebut terjadi pula pada perpolitikan mahasiswa Sosiologi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya angkatan 2014 yang menjadi objek penelitian. Persaingan dalam politik merupakan hal yang wajar apabila terjadi di dalam politik mahasiswa Sosiologi. Hingga akhirnya menimbulkan perselisihan yang tidak nampak secara langsung, layaknya perang dingin. Seperti yang dikatakan Isjwara³ politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaannya. Maka

³ F, Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, 1995, hlm 42.

persaingan yang demikian sangatlah wajar dalam dunia politik, dan sudah menjadi bagian dinamika dari suatu partisipasi dan keterlibatan politik dan sekaligus bagian dari pada fungsi pendidikan politik. Karena mahasiswa bisa merasakan langsung bagaimana sengitnya persaingan politis antar kelompok, dan bagaimana cara agar organisasi mereka masing-masing dapat mewujudkan tujuannya.

Kehidupan organisasi politik di kampus dapat digambarkan sebagai bentuk miniatur sistem politik pemerintahan yang mencakup partai dan pemerintahan Negara. Organisasi ekstra dapat kita analogikan sebagai partai, dan organisasi intra merupakan analogi dari bentuk pemerintahan Negara yang menjadi kedudukan yang diperebutkan dan harus dikuasai oleh partai-partai yang ada. Dengan demikian keterlibatan politik dalam organisasi kampus menjadi suatu simulasi yang berguna bagi pembelajaran mahasiswa tentang bagaimana cara untuk menghadapi suatu permasalahan sosial dan politik.

Keterlibatan politik dalam organisasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk pendidikan politik, sebagai sarana untuk bisa melakukan praktik ilmu politik secara nyata. Karena dengan berpartisipasi dan terlibat, tentunya mahasiswa akan merasakan dan mengetahui bagaimana dinamika dan kehidupan politik yang sebenarnya, tidak hanya terus menelan teori dan pengetahuan politik di dalam perkuliahan saja, karena politik tentunya membutuhkan sebuah praktik. Suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik⁴.

⁴Cangara. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers. 2011, hlm 29.

Dalam praktik politiknya, mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2014 memiliki persepsi politik yang berbeda, karena perbedaan daya nalar serta pengaruh organisasi ekstra sebagai salah satu sarana pendidikan politik dan keterlibatan politik, yang dimana tiap-tiap organisasi ekstra menganut ideologi politik yang berbeda-beda. Hingga akhirnya perbedaan pandangan dan ideologi tersebut terkadang menimbulkan suatu konflik bahkan perpecahan antar kelompok. Hal tersebut akhirnya menjadi sebuah pandangan *stereotype* bagi mahasiswa lain di Jurusan Sosiologi, bahwa kehidupan politik terkesan menimbulkan masalah, konflik dan perpecahan.

Menurut Berkowitz dalam Saiffudin Azwar⁵ “sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut.”

Pandangan *stereotype* demikian tidak hanya berlaku terhadap citra politik di Sosiologi saja, namun berlaku pula terhadap mahasiswa-mahasiswa Sosiologi yang terlibat dalam politik. Dari hasil pengamatan, sebagian mahasiswa memandang bahwa, mahasiswa-mahasiswa yang aktif terlibat dalam organisasi dan politik dinilai tidak mampu membagi waktu antara urusan kuliah dan urusan organisasi, sehingga keterlibatan yang dijalani disisi lain berdampak buruk bagi perkuliahan, dikarenakan mahasiswa terkadang terlalu terlena akan urusan-urusan organisasi dan politik, hingga akhirnya mengesampingkan urusan perkuliahannya. Tentunya hal tersebut bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh mahasiswa lain,

⁵Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 4.

hingga akhirnya sebagian orang memiliki *stigma* akan makna suatu keterlibatan dan berpengaruh terhadap angka ketidak terlibatan mahasiswa dalam organisasi. Karena ketidakterlibatan mahasiswa dalam politik merupakan salah satu bentuk kegagalan dari pada tujuan pendidikan politik.

Beberapa fakta dan kondisi tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

“Peran Pendidikan Politik Kampus terhadap Keterlibatan Mahasiswa dalam Politik” (Kasus Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terlibatnya mahasiswa dalam politik sebagai tujuan pendidikan politik, hanya berlaku pada sebagian mahasiswa.
2. Adanya pandangan negatif terhadap keterlibatan organisasi dan politik pada mahasiswa.
3. Keterlibatan politik yang dijalani sebagian mahasiswa kurang mengarah pada tujuan dari pendidikan politik (kuliah menjadi terbengkalai), dan mempengaruhi persepsi mahasiswa lain.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana capaian pendidikan politik Sosiologi pada mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung dalam dunia politik?
2. Bagaimana keterlibatan politik mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung?

3. Apa faktor pendorong dan penghambat mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung untuk terlibat dalam dunia politik kampus?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana capaian pendidikan politik Sosiologi pada mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung dalam dunia politik.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan politik mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 UIN SGD Bandung untuk terlibat dalam dunia politik kampus.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian dalam hal khazanah pengetahuan akademis, bahwa peneliti dapat menerapkan teori-teori yang ada sebelumnya untuk dipakai dalam penelitian ini, menambah kuat teori yang sudah ada ataupun menemukan teori yang baru.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Pejabat Jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau solusi bagi pejabat jurusan sosiologi meningkatkan kesadaran politik mahasiswa melalui pendidikan politik.

- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai politik khususnya kesadaran mahasiswa sosiologi UIN SGD Bandung terhadap keterlibatan politik kampus.
- c. Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi kegenerasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas politik⁶.

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky yang dikutip oleh Damsar di dalam “Pengantar Sosiologi Politik” dapat diartikan sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum⁷. Miriam Budhiardjo mendefenisikan. Menurut Max Weber masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau

⁶ Affandi, I. *Kepeloporan OKP dalam Pendidikan Politik*. Bandung: IKIP, 1996. Hlm 27.

⁷ Herbert Mc.Closky, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.180.

individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik diatas, dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kita ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut⁸.

Menurut Gerungan dalam Mukhrini⁹ mengemukakan ciri-ciri sikap sebagai berikut :

1. *Attitude* tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu, dalam hubungannya dengan objeknya.
2. *Attitude* dapat berubah-ubah, karena itu attitude dapat dipelajari orang.
3. *Attitude* itu tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan tertentu terhadap objek. Dengan kata lain, *attitude* itu terbentuk,

⁸Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Press, 1995, hal.5-6.

⁹Mukhrini. *Sikap masyarakat Terhadap Program-Program Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dalam Pemilu 2014*, 2014, hlm 17.

dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

4. *Attitude* dapat berkenaan dengan suatu objek saja, juga berkenaan dengan sederet objek yang serupa.
5. *Attitude* mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan. Sifat inilah yang membedakan *attitude* dari kecakapan- kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan.

Semua itu berlaku pula bila kita melihat dalam konteks politik di dunia kampus. Mahasiswa yang seyogya nya terpelajar secara keilmuan dan kemampuan organisasinya, akan memiliki hasrat dan dorongan untuk melibatkan dirinya dalam organisasi dan politik kampus. Terlebih apabila mahasiswa yang menjalankan studinya di fakultas ilmu sosial dan politik, yang telah diketahui memiliki wawasan akan ilmu politik yang telah di berikan di perkuliahannya.

Menurut Siswoyo¹⁰ mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

Dengan demikian, seperti yang telah dikatakan Siswoyo, mahasiswa memiliki intelektual yang tinggi, mampu berpikir kritis dan kecedasan serta dapat

¹⁰Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Pers. Harun Wira 2007, hlm 121.

bertindak dengan tepat. Dan itu semua berkat ilmu yang telah diberikan oleh lembaga kampus seharusnya mahasiswa mampu mengimplementasikan apa yang telah ia dapat ke dalam kehidupannya, khususnya berorganisasi dan berpolitik.

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal yang dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematangan pendirian hidup¹¹.

Namun melihat masih ada mahasiswa Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang kurang tertarik terhadap keorganisasian dan dunia politik di kampus sebagai salah satu sarana pendidikan politik. Padahal dalam konteks mahasiswa sendiri, mereka telah memiliki kapasitas ilmu politik, mereka telah memiliki kemampuan untuk berorganisasi dan berpolitik, yang dibutuhkan hanya tinggal kemauan dari individu-individu tersebut, namun kenyataannya sikap apatis mahasiswa masih begitu terlihat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



¹¹ Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Hlm 27.

Gambar 1.1**Bagan Skema Konseptual**